



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKTOVIANUS BERTHY MANGONTAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 669400

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI , Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 79.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC MIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA XEON 2 SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SX4. X-OVER MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 201.754.305

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.367.254.305

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.367.254.305

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.